

# **LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA**

**PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KARTINI  
TAHUN 2024**



**Gedung EXO Plaza Lt.1 Jl Pangeran Jayakarta Dalam 72 A/A1  
Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat 10730  
TELEPON: +62-21-38269102**

## 1. Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola

### Informasi Umum BPR

Nama BPR/BPRS	<b>BPR Kartini</b>
Alamat	<b>Gedung EXO Plaza Lt.1 Jl Pangeran Jayakarta Dalam no 72 A / A1 Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat 10730</b>
Nomor Telepon	<b>(021) 38269102</b>

#### Penjelasan Umum:

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG - Good Corporate Governance) di PT. BPR Kartini pada tahun 2024 telah membawa perkembangan yang positif dengan meningkatnya kinerja BPR meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan di sepanjang tahun 2024 di tengah kondisi perekonomian dan sektor usaha yang sebelumnya pulih.

BPR Kartini memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan Tata Kelola sesuai standar Tata Kelola yang telah diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga BPR Kartini dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan khususnya di kota Surabaya. Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR Kartini didukung oleh integritas yang tinggi melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ bank baik dari seluruh tingkatan organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral serta signifikan dalam penerapan Penerapan Tata Kelola Perusahaan di lingkungan BPR Kartini.

BPR Kartini telah beroperasi lebih dari 20 tahun dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip Tata Kelola yang dimaksud adalah Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kesetaraan. Hal ini didorong oleh komitmen Bank untuk mencapai Visi, yaitu menjadi penyedia layanan perbankan yang terpercaya dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan dukungan SDM yang kompeten untuk menciptakan nilai tambah bagi para nasabah.

Dalam penerapan Tata Kelola, BPR Kartini selalu mengacu pada 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu Struktur & Infrastruktur, Proses dan Hasil Tata Kelola. Ketiga aspek Tata Kelola tersebut menjadi intisari sekaligus fokus Bank dalam mewujudkan Tata Kelola yang bertujuan untuk melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan.

Di sepanjang 2024 dan untuk di tahun mendatang, BPR Kartini terus berupaya untuk mewujudkan hal-hal tersebut melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan.

### Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola

Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola

**3. Cukup Baik**

#### Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola:

Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal

ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR.

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

1. Nama	Christine Sri Lestari
---------	-----------------------

### Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Utama adalah sebagai berikut:

- a. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku
- b. Merealisasikan pencapaian target Kinerja Keuangan Bank sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank
- c. Melaksanakan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dengan memperhatikan aspek kecukupan SDM dan kompetensinya.
- d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Otoritas Lainnya.
- e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
- f. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai.

### Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:

- a. Penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan secara konsisten dan menerapkan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.
- b. Tingkat Kesehatan Bank telah dipertahankan dalam posisi sehat.
- c. Direksi telah melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia sesuai rekomendasi Dewan Komisaris yaitu : Melakukan evaluasi kinerja (minimal periode per semester) terhadap seluruh pegawai, Memberikan coaching, mentoring dan pembinaan agar lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan. Pemberian sanksi telah dilaksanakan kepada pegawai yang melanggar ketentuan/ peraturan yang berlaku. Apresiasi juga telah diserahkan bagi pegawai yang memberikan kontribusi positif bagi BPR Kartini.
- d. Telah memonitor secara ketat debitur yang mengalami tunggakan mendekati 30 hari dan melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan permasalahan debitur kasus per kasus.
- e. Temuan pemeriksaan OJK telah tuntas ditindaklanjuti
- f. Semua temuan Audit Intern telah ditindaklanjuti dan telah diberikan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait pelaksanaan internal control dalam melaksanakan tugas masing-masing.
- g.

## 3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

1. Nama	Kristanto Aditiawan Soenarjoko
---------	--------------------------------

### **Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:**

Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
- b. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional Bank
- c. Memberikan saran atau advis kepada Direksi berkaitan dengan isu-isu strategis dan proses pekerjaan
- d. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan Instansi lainnya.
- e. Mengkoordinir pembagian tugas Dewan Komisaris.

### **Rekomendasi Kepada Direksi:**

- a. Melaksanakan penerapan Tata Kelola secara konsisten dan penerapan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.
- b. Mempertahankan Tingkat Kesehatan Bank selalu dalam posisi sehat.
- c. Secara rutin melakukan untuk pengelolaan sumber daya manusia yaitu : Evaluasi kinerja (minimal periode per semester) terhadap seluruh pegawai, Memberikan coaching, mentoring dan pembinaan serta lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan, Mampu bertindak tegas dalam pemberian sanksi bagi pegawai yang melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku dan memberikan reward / apresiasi kepada pegawai yang memberikan kontribusi positif bagi BPR Kartini.
- d. Memonitor secara ketat debitur yang mengalami tunggakan < 30 hari agar dapat mendeteksi secara dini setiap potensi kegagalan bayar dan dapat mengantisipasinya secara cepat sehingga kredit tidak jatuh pada kolektibilitas 2.
- e. Semua komitmen perbaikan atas temuan pemeriksaan OJK agar segera ditindaklanjuti dan sudah tuntas pada paling lambat bulan Desember 2024.
- f. Menindaklanjuti semua temuan Audit Internal dan segera mengambil langkah-langkah perbaikan kontrol agar tidak terjadi kembali temuan berulang apalagi yang bersifat signifikan.
- g. Melakukan inovasi untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk proses kerja maupun akuisisi bisnis.

### **4. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite**

#### **Tindak Lanjut Rekomendasi Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite:**

Nihil

### **5. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite**

#### **Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite:**

Nihil.

## 6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR

### Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Christine Sri Lestari
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

### Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Kristanto Aditiawan Soenarjoko
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

## 7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

### Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	Christine Sri Lestari
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

### Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	Kristanto Aditiawan Soenarjoko
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

### Kepemilikan Saham Pemegang Saham BPR/BPRS

Nihil

## 8. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

### Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

1. Nama	Christine Sri Lestari
Nama Bank/Perusahaan Lain	<b>Tidak Ada Kepemilikan Saham</b>
Persentase Kepemilikan (%)	<b>0,00</b>

#### Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

1. Nama	Kristanto Aditiawan Soenarjoko
Nama Bank/Perusahaan Lain	<b>Tidak Ada Kepemilikan Saham</b>
Persentase Kepemilikan (%)	<b>0,00</b>
Nihil	

### 9. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

#### Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

1. Nama	Christine Sri Lestari
Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	<b>Tidak ada</b>
Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	<b>Tidak ada</b>
Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	<b>Tidak ada</b>

#### Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1. Nama	Kristanto Aditiawan Soenarjoko
Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	<b>Tidak ada</b>
Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	<b>Tidak ada</b>
Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	<b>Tidak ada</b>

#### Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

Nihil

## 10. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

### Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

1. Nama	Christine Sri Lestari
Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

### Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1. Nama	Kristanto Aditiawan Soenarjoko
Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

### Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

Nihil

## 11. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

### 1.1. Gaji Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Gaji	1 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Direksi (Rp)	Rp129.000.000
Jumlah Komisaris Penerima Gaji	1 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Komisaris (Rp)	Rp60.000.000

## 1.2. Tunjangan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tunjangan **1 orang**

Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Direksi (Rp)  
**Rp0**

Jumlah Komisaris Penerima Tunjangan **1 orang**

Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Komisaris (Rp)  
**Rp0**

## 1.3. Tantiem Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tantiem **1 orang**

Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Direksi (Rp)  
**Rp0**

Jumlah Komisaris Penerima Tantiem **1 orang**

Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Komisaris (Rp)  
**Rp0**

## 1.4. Kompensasi berbasis saham Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Kompensasi berbasis saham **1 orang**

Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Direksi (Rp)  
**Rp0**

Jumlah Komisaris Penerima Kompensasi berbasis saham **1 orang**

Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Komisaris (Rp)  
**Rp0**

## 1.5. Remunerasi lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Remunerasi lainnya **1 orang**

Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Direksi (Rp)	<b>Rp0</b>
Jumlah Komisaris Penerima Remunerasi lainnya	<b>1 orang</b>
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Komisaris (Rp)	<b>Rp0</b>

### 2.1. Perumahan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Perumahan (Orang)	<b>1 orang</b>
Jumlah Nominal Perumahan Direksi (Rp)	<b>Rp12.000.000</b>
Jumlah Komisaris Penerima Perumahan (Orang)	<b>1 orang</b>
Jumlah Nominal Perumahan Komisaris (Rp)	<b>Rp0</b>

### 2.2. Transportasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Transportasi (Orang)	<b>1 orang</b>
Jumlah Nominal Transportasi Direksi (Rp)	<b>Rp2.400.000</b>
Jumlah Komisaris Penerima Transportasi (Orang)	<b>1 orang</b>
Jumlah Nominal Transportasi Komisaris (Rp)	<b>Rp2.450.000</b>

### 2.3. Asuransi Kesehatan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	<b>1 orang</b>
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Direksi (Rp)	<b>Rp0</b>
Jumlah Komisaris Penerima Asuransi	<b>1 orang</b>

Kesehatan (Orang)

Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan      **Rp0**  
Komisaris (Rp)

#### **2.4. Fasilitas Lain-Lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun**

Jumlah Direksi Penerima Fasilitas Lain-  
Lainnya (Orang)      **1 orang**

Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya  
Direksi (Rp)      **Rp1.200.000**

Jumlah Komisaris Penerima Fasilitas  
Lain-Lainnya (Orang)      **1 orang**

Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya  
Komisaris (Rp)      **Rp2.400.000**

Remunerasi telah sesuai dengan hasil RUPS.

### **12. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah**

#### **1. Rasio (a) gaji pegawai yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang terendah**

Rasio (a/b)      **0,02 : 1**

#### **2. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Direksi yang terendah**

Rasio (a/b)      **0,00 : 1**

#### **3. Rasio (a) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah**

Rasio (a/b)      **0,00 : 1**

#### **4. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi**

Rasio (a/b)      **0,02 : 1**

#### **5. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang tertinggi**

Rasio (a/b)      **0,01 : 1**

Nihil

### **13. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun**

<b>1.</b>	Tanggal Rapat	<b>02 April 2024</b>
	Jumlah Peserta	<b>11 orang</b>
<b>Topik/Materi Pembahasan:</b>		
Evaluasi Kinerja BPR Triwulan 1 2024		
<b>2.</b>	Tanggal Rapat	<b>15 Juli 2024</b>
	Jumlah Peserta	<b>1 orang</b>
<b>Topik/Materi Pembahasan:</b>		
Evaluasi Kinerja BPR Triwulan 2 2024		
<b>3.</b>	Tanggal Rapat	<b>14 November 2024</b>
	Jumlah Peserta	<b>1 orang</b>
<b>Topik/Materi Pembahasan:</b>		
Evaluasi Kinerja BPR Triwulan 3 2024.		
<b>4.</b>	Tanggal Rapat	<b>13 Januari 2025</b>
	Jumlah Peserta	<b>1 orang</b>
<b>Topik/Materi Pembahasan:</b>		
Evaluasi Kinerja BPR Triwulan 4 2024.		

Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat 4 (empat) kali dalam setahun di sepanjang tahun 2024.

### **14. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris**

#### **Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun**

<b>1.</b>	Nama Anggota Dewan Komisaris	<b>Kristanto Aditiawan Soenarjoko</b>
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	<b>4 kali hadir</b>
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	<b>0 kali hadir</b>

Semua rapat Dewan Komisaris dihadiri lengkap oleh anggota Dewan Komisaris.

## 15. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

### 1.1. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Direksi

Total Fraud Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>

### 1.2. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Dewan Komisaris

Total Fraud Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>

Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan

**0 kasus**

#### 1.3. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan **0 kasus**

Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya **0 kasus**

Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan **0 kasus**

Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan **0 kasus**

Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya **0 kasus**

Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan **0 kasus**

Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya **0 kasus**

Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan **0 kasus**

#### 1.4. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tidak Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan **0 kasus**

Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya **0 kasus**

Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan **0 kasus**

Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan **0 kasus**

Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya **0 kasus**

Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan **0 kasus**

Belum Diupayakan Penyelesaiannya **0 kasus**

Pada Tahun Sebelumnya

Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan **0 kasus**

Selama periode tahun 2024 (Tahun Laporan) tidak terdapat penyimpangan atau kecurangan intern (internal fraud) yang dilakukan oleh Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap pada PT. BPR Kartini.

## 16. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

### 1.1. Permasalah Hukum yang Telah Selesai

Permasalahan Hukum Perdata yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) **0 kasus**

Permasalahan Hukum Pidana yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) **0 kasus**

### 1.2. Permasalah Hukum yang Dalam Proses Penyelesaian

Permasalahan Hukum Perdata yang Dalam Proses Penyelesaian **0 kasus**

Permasalahan Hukum Pidana yang Dalam Proses Penyelesaian **0 kasus**

Nihil.

## 17. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Nihil.

## 18. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Nihil.

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi transparansi PT Bank Perekonomian Rakyat KARTINI untuk tahun 2024. Demikian kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapan terima kasih.

Jakarta, 25 April 2025

PT Bank Perekonomian Rakyat KARTINI

Disetujui oleh :



CHRISTINE SRI LESTARI  
DIREKTUR



KRISTANTO ADTIAWAN SOENARJOKO  
KOMISARIS